



**TAK NYAMAN DIPANDANG:** Pengguna jalan melintas di dekat sampah yang dibuang oleh warga di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Jogja, beberapa waktu lalu. Kota Jogja akan melakukan kerja sama antarpemerintah dengan meminjam lahan seluas kurang lebih 2.400 meter persegi di kawasan TPA Piyungan untuk pengolahan sampah.

## Tujuan Wisata, Residu Sampah di Kota Jogja Jadi PR

PEMROV DIJ mendorong Pemkot Jogja untuk segera merealisasikan desentralisasi mandiri kelola sampah. Terlebih sesuai perhitungan, pada April mendatang TPA Piyungan tak lagi mampu menampung dengan batasan kuota karena kapasitas telah penuh. Sehingga, segera mendesak agar desentralisasi bisa terwujud.

Sekprov DIJ Beny Suharsono mengatakan, dua kabupaten dan satu kota harus segera mengantisipasi agar sampah yang dihasilkan tidak benar-benar penuh. Pun penuh, harus memiliki alternatif pelayanan kepada masyarakat.

"Kan hitungan matematikanya kalau tidak dibatasi (kuota sampahnya) kan tidak lagi mampu menampung sampah yang jelas," katanya di Kompleks Kepatihan Kamis (11/1).

Beny menjelaskan, dua kabupaten telah memulai melakukan desentralisasi secara mandiri kelola sampah. Seperti Kabupaten Sleman dengan pengoperasian tempat pengolahan sampah terpadu di Desa Tamanmartani Kalasan.

Kota Jogja akan melakukan kerja sama antarpemerintah dengan meminjam lahan seluas kurang lebih 2.400 meter persegi di ka-

wasan TPA Piyungan untuk pengolahan sampah. "Sekarang tinggal yang diantisipasi pemerintah kota. Jalan yang bisa dilakukan adalah mengakselerasi semua rencana yang sudah di siapkan pemkot tidak menunggu triwulan ketiga bahkan kedua," ujarnya.

Menurutnya, pengolahan sampah ini harus menjadi perhatian dan penanganan serius. Terlebih DIY menjadi pusat pariwisata, yang bisa diduga adanya lonjakan wisatawan. Hal ini membawa konsekuensi juga dengan sampah yang mereka produksi. "Mereka kan belanja banyak hal yang dibawa pulang ke daerah asal

tapi residunya kan ada di daerah Jogja terutama kota," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo juga meminta wilayah Kartamanul segera merealisasikan percepatan program desentralisasi mandiri sampah. Sebab, sesuai perhitungan instansi ini dengan skema 370 ton per hari, maka TPA Piyungan sudah tidak mampu menampung di akhir Maret 2024. "Artinya sesuai kebijakan pemda, bahwa pengolahan sampah desentralisasi ke kabupaten/kota harus dipercepat," katanya. **(wia/pr/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005